

ISBN : 978-602-72494-9-3



Prosiding

Seminar Nasional & Call for Paper

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Jember



Tema :

"Pendayagunaan Keunggulan Komparatif Dan Keunggulan Kompetitif
Industri Nasional Dalam Kancah Ekonomi Pasar Bebas Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA)"

Sabtu, 06 Juni 2015

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER

Editor: Dr. Nurul Qomariah, MM
Desain Sampul: Ryan PMB
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
ISBN: 978-602-72494-9-3

Diterbitkan Oleh :
FE UM Jember dan LPPM UM Jember
Jalan Karimata 49 Jember 68121
Telp. (0331) 336728
Fax.(0331) 337957

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit

Pengaruh Teoritis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Saham LQ 45 Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	
<i>Dwi Cahyono dan Nurul Qomariah, Prima Ramdani</i>	88-100
Intellectual Capital, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Dan Profitabilitas Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	
<i>Anwar, Suwarno dan Moh. Halim</i>	101-112
Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Dengan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Dan Firms Size	
<i>Ni Nyoman Putu Martini</i>	113-125
Kinerja Intellectual Capital Perbankan Syariah Nasional	
<i>Maheni Ika Sari</i>	126-137
Pengaruh Intensitas Perencanaan Strategis terhadap Kinerja Financial(Studi Kasus Pada BPR di Wilayah Kab. Jember)	
<i>Bayu Wijayanti</i>	138-147
Pengaruh Kemampuan Rasio Keuangan Sebagai Prediktor Pertumbuhan Laba	
<i>Norita Citra Yulianti</i>	148-159
Pengaruh Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Kontrol	
<i>Umi Murtini dan Gerry Rante</i>	160-171
Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia	
<i>Arik Susbiyani</i>	172-182
Model Intermediasi Serempak Keputusan Keuangan Pada Pengujian Inter-Relasi Struktur Kepemilikan Dan Pengungkitan Nilai Perusahaan	
<i>Akhmad Suharto</i>	183-195
Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Di Yogyakarta	
<i>Fredy Pandapotan Panggabean dan Astuti Yuli Setyani</i>	196-207
Model Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Pada UMKM Di Kabupaten Jember	
<i>Yulinartati dan Norita Citra Y</i>	208-219

PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA

Arik Susbiyani

Prodi Akuntansi FE Universitas Muhammadiyah Jember

ariksusbiyaniunmuh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemandirian, umur, dan pendapatan transfer terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *purposive sampling* sehingga jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 89 kabupaten dan kota. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan ukuran pemerintah kabupaten dan kota berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan. Pemerintah daerah yang memiliki aset total tinggi mendapat perhatian yang lebih tinggi dari masyarakat. Akibatnya, pemerintah daerah akan lebih transparan dalam menyampaikan informasi melalui kepatuhan pengungkapan. Hasil lainnya menunjukkan kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan. Sebaliknya, hasil penelitian ini gagal membuktikan variabel umur dan pendapatan transfer berpengaruh terhadap kepatuhan pengungkapan.

Kata Kunci: kemandirian, kepatuhan pengungkapan wajib, pendapata transfer, umur, ukuran pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan pihak yang ditugasi menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak. Pemerintahan daerah melalui kepala daerah memegang amanat rakyat untuk menyusun, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan anggaran. Pendapatan dalam anggaran sebagian bersumber dari dana rakyat, yaitu pembayaran pajak dan retribusi. Pendapatan dari dana rakyat dan sumber-sumber lainnya itulah yang harus dikelola pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggungjawab.

Perhatian terhadap isu transparansi di Indonesia semakin meningkat dalam satu dekade terakhir ini. Salah satu indikatornya ialah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Menurut Mulyana (2006), faktor yang menyebabkan isu transparansi keuangan daerah semakin meningkat ialah krisis ekonomi yang telah

memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Ditambah lagi desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan ini merupakan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif.

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Pemerintah pusat maupun daerah wajib menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter (Chariri dan Ghozali, 2003: 247). Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka sejak tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan dikeluarkan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun bukti mengindikasikan kurangnya pengungkapan informasi akuntansi pada organisasi sektor publik. (Ismail & Abu Bakar, 2011; Herawaty & Hoque, 2007). Dalam praktiknya tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap standar akuntansi pemerintahan masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya pemerintah daerah yang mengungkapkan secara penuh laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini didukung dari beberapa hasil penelitian yang menyebutkan bahwa rata-rata pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 52,57 % (Mandasari, 2009), 54,54 % (Retnoningsih, 2009), dan 22% Lesmana (2010).

Penelitian ini memfokuskan pada kepatuhan pengungkapan wajib akuntansi yang terdapat pada neraca yang tertuang dalam standar akuntansi pemerintahan. Neraca mendapatkan perhatian penting karena disamping sarana pelaporan keuangan, neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh dari suatu entitas (pemerintah daerah) pada suatu titik waktu (Bastian, 2006: 432). Neraca akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah, para kreditor, serta masyarakat luas tentang posisi atau keadaan dari kekayaan atau aktiva daerah beserta kewajiban dan ekuitas dananya pada tanggal tertentu (Bastian, 2006: 433).

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah ukuran pemerintah daerah,

kemandirian, umur pemerintah daerah, dan pendapatan transfer berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini memberikan tambahan literatur tentang praktik pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan design penelitian berikutnya. Bagi pemerintah pusat selaku regulator dalam pembuatan Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengungkapan

Pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk pengungkapan informasi keuangan. Pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan (Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut Hendriksen dan Breda (2002) ada bukti yang menunjukkan bahwa entitas enggan menambah luasnya pengungkapan keuangan tanpa adanya tekanan dari profesi akuntansi atau pemerintah. Beberapa alasannya ialah pengungkapan dapat memberi manfaat kepada pesaing serta seringkali diyakini bahwa investor tidak dapat memahami kebijakan dan prosedur akuntansi.

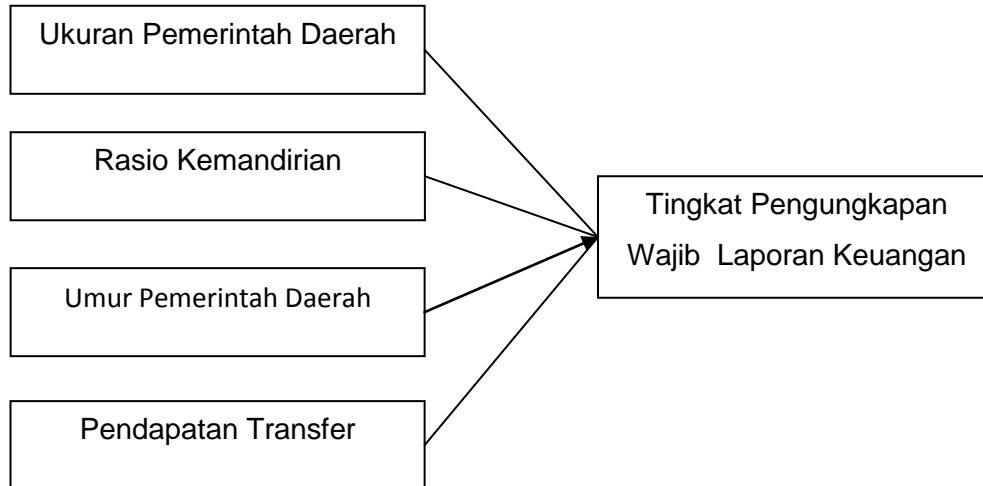
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, standar akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan pemerintah ini dijadikan pedoman dalam pengungkapan wajib informasi laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah diharapkan tercipta transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan. Terdapat 11 PSAP dalam standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan minimal yang dipersyaratkan dalam PSAP diantaranya pada akun-akun yang tercantum dalam Neraca, yaitu PSAP Nomor 5 sampai dengan PSAP Nomor.

Hipotesis Penelitian

Penelitian ini akan menguji dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemandirian, umur pemerintah daerah, dan pendapatan transfer terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Seperti pada penelitian

sebelumnya Laswad et,al (2005) yang menguji pengaruh ukuran pemerintah, *leverage*, dan kekayaan pemerintahan daerah. Berdasarkan kajian teori dan penelitian empiris sebelumnya, rerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1



Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Giroux dan Shields (1993) dalam Styles dan Tennyson (2007) menyatakan bahwa dalam iklim permintaan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah berkaitan dengan informasi kinerja, pada umumnya pemerintah daerah atau pemerintah kota yang besar akan menyediakan informasi yang lebih tinggi. Temuan literatur tentang pengungkapan akuntansi sektor publik menunjukkan bahwa aktivitas yang lebih tinggi menghasilkan permintaan yang lebih besar untuk informasi tentang kinerja pemerintah dan kebutuhan untuk pengungkapan yang lebih oleh pemerintah daerah lebih besar (Stles dan Tennyson, 2007).

Lesmana (2010) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah yang besar relatif dikenal oleh publik dan sebagai bentuk dari akuntabilitas publik salah satunya adalah melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi biaya keagenan sehingga pemerintah daerah dengan mengungkapkan informasi lebih banyak dalam LKPD.

Penelitian yang membuktikan adanya pengaruh size terhadap tingkat pengungkapan yakni oleh Laswad, et, al (2005), Stles dan Tennyson (2007), Lesmana (2010). Hasil penelitian tersebut membuktikan adanya pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian di atas, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Kemandirian dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2002). Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2007). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah memotivasi pemerintah daerah akan lebih transparan dalam menyampaikan informasi. Berdasarkan pada penjelasan tersebut hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H6 : Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Umur Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hossain dan Hammami (2009) menjelaskan bahwa tingkat pengungkapan dapat dipengaruhi oleh umur pemerintah daerah. Organisasi yang lebih muda mungkin secara kompetitif akan menderita rugi jika mereka mengungkapkan item informasi tertentu. Diperlukan biaya dan kemudahan dalam hal pengumpulan, pengolahan, dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan. Biaya ini kemungkinan akan lebih berat bagi organisasi yang lebih muda daripada organisasi yang lebih tua. *Ketiga*, kondisi organisasi yang lebih muda mungkin tidak memiliki 'track record' yang dapat diandalkan untuk pengungkapan publik dan karena itu mungkin memiliki informasi lebih sedikit untuk mengungkapkan atau kurang kaya pengungkapan.

Berdasarkan analisis di atas, pemerintah daerah yang lebih tua akan berusaha memenuhi pengungkapan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan lebih besar dari pada pemerintah daerah yang lebih muda. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Pendapatan Transfer dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Abdulah dan Halim (2003) menyatakan bahwa pendapatan transfer adalah jenis pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah akan berusaha mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan transfer yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah (Lesmana, 2010). Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Pendapatan transfer berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2010 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota tahun 2010. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2004). Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: pemerintah daerah yang memiliki otonomi, memiliki laporan keuangan lengkap, dan laporan keuangan yang dapat diperoleh.

Definisi Operasional Variabel

Variabel independen: a) ukuran pemerintah daerah diukur dengan aset total, b) kemandirian diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan, c) umur diukur berdasarkan sejak diterbitkannya peraturan perundangan pembentukan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan tahun (Lesmana, 2010), d) pendapatan transfer diukur dengan membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Variabel dependen: kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan diukur dengan melakukan skor terhadap butir pengungkapan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Butir yang wajib diungkapkan pemerintah daerah dalam laporan keuangan adalah butir-butir yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu yang tertuang dalam PSAP Nomor 5 sampai dengan PSAP Nomor 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada kriteria sampel, yaitu pemerintah kabupaten/kota yang memiliki otonomi, memiliki laporan keuangan lengkap, dan laporan keuangan tersedia maka diperoleh 89 laporan keuangan pemerintah yang dijadikan sampel penelitian.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel meliputi ukuran pemerintah daerah, kemandirian, umur pemerintah daerah, dan pendapatan transfer. Tabel 5.1 di bawah ini menyajikan statistik deskriptif untuk semua variabel dalam penelitian

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Diskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemerintah Kabupaten Dan Kota (X1)	89	91118779781	20298237666923	2193459024810.45	2420489731176.551
Kemandirian (X2)	89	.05	.25	.1643	.06624
Umur (X3)	89	7	63	34.29	18.045
Pendapatan Transfer (X4)	89	.7380	.9820	.881461	.0600990
Kepatuhan Pengungkapan (Y1)	89	.39	.61	.4701	.07278
Valid N (listwise)	89				

Sumber: Data Diolah.

Berdasarkan pada Tabel 1. menunjukkan bahwa kabupaten dan kota yang memiliki aset total minimum sebesar Rp. 91.118.779.781,00 dan nilai maksimum sebesar Rp. 20.298.237.666.923,00. Nilai rata-rata hitung untuk aset total adalah sebesar Rp. 2.193.459.024.810,00. Rasio kemandirian memiliki nilai minimum sebesar 0.05 dan nilai maksimum adalah sebesar 0.25 dengan rata-rata hitung sebesar 0.16. Umur pemerintah daerah termuda adalah 7 tahun dan tertua adalah 63 tahun. Pendapatan transfer minimum 0.738 dan nilai maksimum adalah sebesar 0.9820 dengan nilai rata-rata hitung untuk pendapatan transfer 0.881. Tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan rata-rata 0.47, pengungkapan wajib minimum sebesar 0.39 dan maksimum sebesar 0.61.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolonieritas

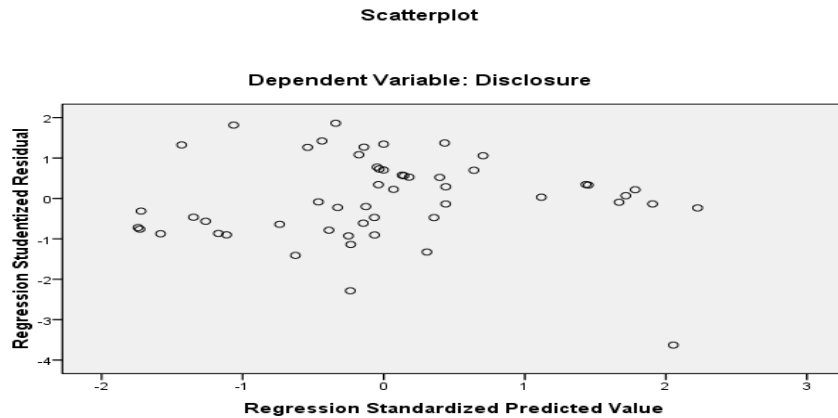
Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) (Ghozali, 2005: 95). Jika hasil dari pengujian menunjukkan bahwa tidak ada nilai toleransi yang kurang dari 10% ataupun hasil perhitungan VIF yang menunjukkan bahwa tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10 dari setiap variabel independen maka di dalam model regresi tidak terdapat gejala adanya multikolonieritas antar variabel independen (Ghozali, 2005: 97). Berikut ini adalah hasil dari uji multikolonieritas menggunakan nilai toleransi dan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
LogUkuran	0.813	1,231
Kewajiban	0.990	1.045
Transfer	0.968	1.033
Umur	0.837	1.195

Sumber: Data Diolah .

2. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas

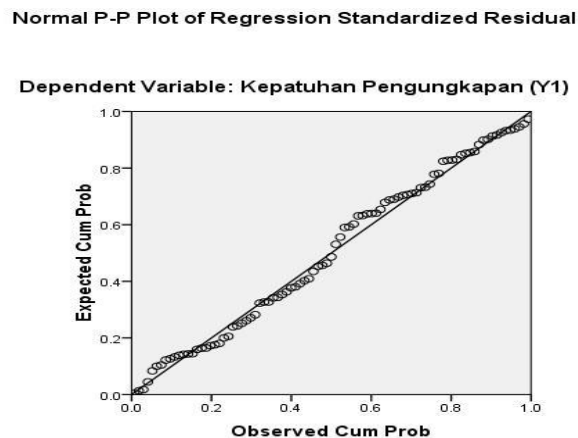


Berdasarkan pada gambar 2. menunjukkan bahwa terlihat dari tidak adanya pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Normalitas

Berdasarkan pada tampilan gambar 2 grafik P-P Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk prediksi pengungkapan wajib laporan keuangan berdasarkan masukan variabel independennya.

Gambar 3



Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dengan regresi berganda nampak pada Tabel 3. berikut ini:

Tabel 3 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.100	.362		-.275	.784
	LogUkuran Pemerintah Kabupaten Dan Kota (X1)	.024	.010	.261	2.359	.021
	Kemandirian (X2)	.328	.122	.268	2.685	.009
	Umur (X3)	.000	.000	.100	.985	.327
	Pendapatan Transfer (X4)	-.095	.147	-.071	-.647	.520

Sumber : Data Diolah.

Model persamaan berdasarkan hasil analisis regresi disajikan dalam persamaan berikut ini:

$$Y = -100 + 0,024 X1 + 0,328 X2 + 0,000 X3 - 0,095 X4 + e$$

Berdasarkan pada tabel 5.8 tersebut terdapat dua variabel independen yang secara parsial mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu ukuran pemerintah daerah dan kemandirian pemerintah daerah. Dua variabel independent tersebut memiliki tingkat signifikansi 0,021 (ukuran pemerintah daerah) dan 0,009 (kemandirian pemerintah daerah).

Tabel 4 : Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.403 ^a	.162	.122	.07598

Sumber : Data Diolah.

Nilai Adjusted R² adalah sebesar 0,162, yang berarti bahwa 16,20% variasi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel ukuran pemerintah daerah, kemandirian, dan pendapatan transfer. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, temuan ini mendukung hipotesis 1 yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki aset total tinggi lebih banyak menanggung masalah pengawasan dari masyarakat, terutama berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya ekonomi. Pemerintah daerah memanfaatkan media pengungkapan laporan keuangan untuk menekan tingkat pengawasan dari masyarakat.

Kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan. Temuan ini mendukung hipotesis 2 bahwa kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kemandirian tinggi akan lebih transparan menyampaikan informasi. Kemandirian keuangan dianggap sebagai kinerja keuangan yang baik,

pemerintah daerah yang memiliki kemandirian tinggi memiliki arti bahwa kemampuan daerah untuk menggali potensi yang berasal dari daerah sendiri semakin tinggi atau dapat diartikan derajat ketergantungan terhadap bantuan dana sksternal semakin rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang berkinerja baik akan lebih trnsaparan untuk menyampikan informasi dengan memnfaatkan media laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebaliknya, penelitian ini gagal membuktikan bahwa umur berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hasil ini tidak mendukung Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa umur berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hasil penelitian ini juga tidak dapat membuktikan pendapatan transfer berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hasil ini tidak mendukung Hipotesis 4 bahwa Pendapatan Transfer berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Praktik pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia masih sangat rendah. Rata-rata nilai pengungkapan wajib sebesar 56 %, artinya bahwa pemerintah daerah belum menyajikan semua informasi yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan. Pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami informasi apa saja yang wajib diungkapkan dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dua variabel ukuran pemerintah daerah dan kemandirian pemerintah daerah positif dan signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S dan Halim, A. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi*. Vol I No.2. h. 90-109.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erllangga. Jakarta
- Chariri, A. Dan Ghozali, I. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Giroux, G. and McLelland, A.J. 2003. Governance Structures and Accounting at large Municipalities. *Journal of Accounting and Public Policy*. p. 203-230.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3. Penerbit Salemba Empat.

- Hendriksen, E. Dan dan Breda, 2000. Teori Akunting. Alih Bahasa: Herman Wibowo. Edisi Kelima.
- Hossain, Mohammed dan Hammami, Helmi. 2009. Voluntary Disclosure In The Annual Reports Of An Emerging Country; The Case Of Qatar, *Advances In Accounting, Incorporating Advances In International Accounting* 25.
- Ismail, S dan Bakar, NBA, 2011. Reporting Practise Of Malaysian Public Universities; The Extend Of Accountability Disclosure. *African Journal Of Business management* Vol 5, 2011.
- Laswad, Fawzi and Oyelere, Peter. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy* 24.
- Lesmana, S.I. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia. Tesis, Program Studi Magister Akuntansi. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mandasari, P. 2009. Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian Local Government. Tesis Master. Universitas Sebelas Maret.
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Kedua. Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mulyana, Budi, 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No. 1, Mei 2006.
- Nur Indriantoro, Supomo, B., (1999), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Sugiyono. 2004. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Keenam. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Styles and Tennyson. 2007. The Accessibility Of Financial Reporting Of U.S. Municipalities On The Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.

SERTIFIKAT

Nomor : 4000/II.3.AU/FE/F/2015

Diberikan Kepada

Dr. Arik Susbiyani, M.Si

Sebagai

PEMAKALAH

Seminar Nasional & Call For Paper
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember

“Optimalisasi Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif Industri Nasional Dalam Kancah
Ekonomi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”

06 Juni 2015



Dekan FE Unmuh Jember

Drs. Akhmad Suharto, MP
NPK. 89 06 242

Jember, 06 Juni 2015
Ketua Panitia

Dr. Arik Susbiyani, M.Si
NPK. 01 09 289